

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Publik Administration, New Publik Management dan New Publik Service). Makassar. Jurnal Politik Profetik. Vol.4 No..2.
- Bandaso. (2015). Kinerja Pelayanan Sarana Umum di Kawasan Pemukiman Terpadu Panakukang Mas Kota Makassar Berdasarkan Pendapat Masyarakat Pengguna. Jurna Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol.11 (1) ; 52-62.
- Bhat, Chandra, et al. 2000. Accessibility Measures: Formulation Considerations and Current Applications. Austin: The University of Texas. Diakses pada : usu.ac.id: https://ctr.utexas.edu/wpcontent/uploads/pubs/4938_2.pdf
- Chrisan Aditya & Dewi Utami. (2018). Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Melalui Transportasi Publik (Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI Yogyakarta). Jurnal Ilmu Sosial
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Dwiyanto, A. (2011). MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK: PEDULI, INKLUSIF, DAN KOLABORATIF. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Demartoto, Argyo. 2005. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel, Surakarta: UNS Press
- Hardjanti, D. K. (2016). Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas. *Perspektif Hukum*, 16(1), 1–17.
- Hastuti, Dewi, K R., Pramana Putri, Sadaly, H. 2020. Jakarta. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilita. The Smeru Research Institute.
- Kurniawan. H dkk. (2014). *PERANCANGAN AKSESIBILITAS UNTUK FASILITAS PUBLIK*. Gadjah Mada University Press.
- Maftuhin, A. (2014). Aksesibilitas Ibadah Bagi Difable (Studi atas Empat Mesjid di Yogyakarta. Jurnal Inklusi. Yogyakarta. Vol.1 (2).
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan nasional. *Era Hukum*, 2(1), 1–19. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu>

Pramashela & Rachim. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.

Ratminto & Septi Wanarsih. (2005). *MANAJEMEN PELAYANAN*. Pustaka Pelajar.
Haryanto & Iriyanto. (2021). *PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS*. Media Nusa Creative (MNC).

Salsabiila, M., & Yuadi, I. (2023). Analisis Bibliometrik Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(3), 171–184. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i3.18782>

Susilawati, C., Sakawati, H., & Sulmiah. (2023). Accessibility of Public Services for Service Users with Disabilities at the Social Service in Makassar City. *Jurnal Aktor*, 2.

Syafi'ie. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1, 269–290. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208/987>

Sawir, M. (2020). *BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK Konsep, Teori, dan Aplikasi*. CV. BUDI UTAMA.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

Zakiyah, Ummi & Fadiyah, Dina. (2020). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pembangunan*. Vol. 11 (1), 31-32.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Tentang penyandang disabilitas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Kemenpan Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/2006 Tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan

WEBSITE

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2020)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas>

<https://makassar.terkini.id/penyandang-disabilitas-di-sulsel-luput-perhatian-pada->

masa-pandemi-covid-19/?showall#!

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-inklusif>

<https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-evaluasi-sarana-bagi-kaum-rentan-untuk-wujudkan-pelayanan-publik-inklusif#:~:text=Berdasarkan%20UU%20No.%2025%2F2009,perlakuan%20khusus%20bagi%20kelompok%20rentan.>

<https://pencerahnusantara.org/mengenal-klompok-rentan-definisi-hak-dan-pelanggaran-yang-dialami>

<https://siga.dp3amakassar.com/data-107-jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-kelamin-dinas-sosial-kota-makassar.html>

<https://sulsel.fajar.co.id/2022/12/29/inovasi-perisai-dukcapil-makassar-sabet-penghargaan-innovative-mayor-award-ima-2022/#:~:text=PERISAI%20DUKCAPIL%20atau%20Pelayanan%20Rentan,dan%20Lanjut%20Usia%20yang%20tidak>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Hafifa Rahman

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar 1 September 2000

Alamat : Jl. Borong Raya Baru 1 No.7 Makassar

Nama Orang tua :

Ayah : Ir. H. Abd Rahman L. MH

Ibu : Hj. Hadiah S.Pd

Pekerjaan Orang tua :

Ayah : Pensiun

Ibu : Pensiun

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD INPRES BORONG
2. SMP : GONTOR PUTRI 3
3. SMA : GONTOR PUTRI 3
4. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Humanis Fisip Unhas
2. Paduan Suara Unhas (PSM)

Lampiran. 2. Dokumentasi



**Wawancara Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**



**Wawancara Ketua Pelayanan
inovasi perisai**



Wawancara Masyarakat Lansia



**Wawancara Masyarakat disabilitas
netra**



Pegawai Dukcapil yang bertugas untuk mengarahkan kaum rentan

Lampiran. 3. Surat Keterangan Izin Melakukan penelitian dari DPMPSTSP
Provinsi Sulawesi Selatan


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 2878/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 1086/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NUR HAFIFA RAHMAN
Nomor Pokok	: E011201042
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INKLUSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Februari s/d 30 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

	ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008
---	--

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran. 4. Surat Keterangan Izin Melakukan penelitian dari DPMPSTP Kota Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor: 070/1305/SKP/SB/DPMPSTP/2/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2878/S.01/PTSP/2024, Tanggal 06 Februari 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1299/SKP/SB/BKBP/2/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	NUR HAFIFA RAHMAN
NIM / Jurusan	:	E011201042 / Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	6 Februari 2024 - 30 Maret 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	" AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INKLUSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolsmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 2024-02-13 15:34:26
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Teduh Bersinar No. 3 Komp. Griya Fajar Mas - Makassar
Email: dukcapil@makassar.go.id - <https://dukcapil.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 37/DISDUKCAPIL/000.9/III/2024

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar Nomor : 070/1305/SKP/SB/DPMPSTP/2/2024 tanggal 13-02-2024, yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NUR HAFIFA RAHMAN**
NIM : E011201042
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pekerjaan / Instansi : MAHASISWA (S1) / UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul : **"AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INKLUSI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR"**.

benar telah melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dari tanggal 16 Februari s/d 26 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Maret 2024

KEPALA DINAS,



Muh. Hatim, S.STP.,M.Tr.AP
NIP. 198610172006021001